



BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 95 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah dimana Kepala Daerah melaporkan penerapan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya dilakukan penilaian untuk diberikan penghargaan dan/atau insentif,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 587) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau insentif daerah.
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
13. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Inovasi, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 19;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025
- KESATU** : Menetapkan Program Inovasi Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023 dalam bentuk:
a) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
b) Inovasi Pelayanan Publik
c) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- KEDUA** : Menetapkan Program Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini .
- KETIGA** : Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu inovasi.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 15 Mei 2025



Lampiran I : Keputusan Bupati Halmahera Selatan
 Nomor : 95 Tahun 2025
 Tanggal : 15 Mei 2025
 Tentang : Penetapan Nama-Nama Inovasi

NO	NAMA INOVASI	OPD PEGAMPU	KATEGORI INOVASI
1	2	3	4
1	GASAK PEKEBUN (GERAKAN DAN AKSI PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN) SARUMA	PERTANIAN	PENERAPAN
2	APLIKASI E - ABSENSI	KEPEGAWAIAN	PENERAPAN
3	PENDAMPINGAN PERIZINAN MENGGUNAKAN MOTOR DAN MOBIL KELILING (DAMPING NANDOLING)	PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENERAPAN
4	APLIKASI FISH SARUMA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENERAPAN
5	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPROTOKOLAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	(BAGIAN PROTOKOLER)	PENERAPAN
6	BAS TEFALA (BUKU SAKU TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PROGRAM BSPS)	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENERAPAN
7	LIPPUNA (LAYANAN ON – LINE PENGADUAN PEREMPUAN DAN ANAK)	DP3AKB	PENERAPAN
8	PENERAPAN JARINGAN KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MANAJEMEN INTERNET BERBASIS KONTROL OLT (Optical Line Terminal)	KOMINFO	PENERAPAN
9	PEMANFAATAN PUSAT DATA DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	KOMINFO	PENERAPAN
10	SISEKI (SISTEM SERTIFIKAT ELEKTRONIK) HALMAHERA SELATAN	KOMINFO	PENERAPAN
11	APABETA DUKCAPIL 2	DINAS CAPIL	PENERAPAN
12	SIMPONI DUKCAPIL2	DINAS CAPIL	PENERAPAN
13	DUKCAPIL GO TO SCHOOL	DINAS CAPIL	PENERAPAN

NO	NAMA INOVASI	OPD PEGAMPU	KATEGORI INOVASI
1	2	3	4
14	Si_PINKER (SISTEM PELAYANAN INTEGRASI KERJA	NAKERTRANS	PENERAPAN
15	UNIT LAYANAN FALIDASI TENAGA KERJA ASING (ULFA)	NAKERTRANS	PENERAPAN
16	APLIKASI SAKTI	KESEHATAN	PENERAPAN
17	PERCEPATAN SISTEM PENGAWASAN TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI SIWASIT	INSPEKTORAT	PENERAPAN
18	SMILE HALSEL	BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	PENERAPAN
19	SIBELA (SISTEM INFORMASI BAPPELITBANGDA) HALSEL	BAPPELITBANGDA	PENERAPAN
20	KARSA (KABAR SARUMA) PEMANFATAN GOOGLE MEET DALAM PELATIHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	DINAS PENDIDIKAN	PENERAPAN
21	SINAR AMPU	DINSOS	PENERAPAN
22	SITANGKAS (STRATEGI PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)	DISPERKIM	PENERAPAN

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 15 Mei 2025

